



I N T E G R A
G R O U P

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Yang Tidak Diaudit
Tanggal 31 Maret 2023**

**PT Integra Indocabinet Tbk
dan Entitas Anaknya**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

**Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	5 - 48

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Halim Rusli |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Margorejo Indah B-825
Kec. Wonocolo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8910434 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Wang Sutrisno |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Kertajaya Indah Timur 17/56
Kec. Sukolilo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8910434 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Integra Indocabinet Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 27 April 2023
Atas nama dan mewakili Direksi



Halim Rusli
Direktur Utama

Wang Sutrisno
Direktur

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2, 4, 26	68,253,166,561	267,209,720,278
Dana yang dibatasi penggunaannya		-	40,000,000,000
Piutang usaha			
Pihak ketiga, bersih	2, 5, 26	329,014,225,051	344,715,352,244
Pihak berelasi	24	5,915,742,151	7,401,450,105
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	2, 6	4,820,796,098	8,504,275,347
Pihak berelasi	24	158,494,443,770	145,270,612,188
Persediaan	2, 7	2,431,449,888,153	2,515,305,043,174
Pajak dibayar di muka	2, 16	30,766,788,930	34,893,655,046
Biaya dibayar di muka	2	19,153,218,384	7,119,769,484
Uang muka pembelian	8	1,145,224,350,499	1,071,335,459,967
Jumlah Aset Lancar		4,193,092,619,597	4,441,755,337,833
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian	8	36,017,258,862	34,738,883,363
Aset pajak tangguhan	2	18,091,705,000	18,091,705,000
Aset biologis	2, 10	14,620,616,242	14,557,846,542
Taksiran tagihan pajak	2	64,790,661,538	48,929,308,218
Properti investasi	2, 11	237,719,939,700	237,719,939,700
Investasi	2	44,138,740,252	44,138,740,252
Aset tetap - bersih	2, 11	1,978,252,296,959	2,002,881,849,097
Aset hak guna usaha	2, 15	95,393,288,239	88,431,900,344
Aset lain-lain - bersih	2, 12	27,433,953,411	25,099,756,405
Jumlah Aset Tidak Lancar		2,516,458,460,203	2,514,589,928,921
JUMLAH ASET		6,709,551,079,800	6,956,345,266,754

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13	1,308,768,093,260	1,536,030,897,378
Utang usaha			
Pihak ketiga	2, 14, 25	62,022,080,436	86,964,658,029
Pihak berelasi	2, 24	26,849,348	8,000,000
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	2	3,161,810,997	3,464,080,461
Pihak berelasi	2, 24	1,707,911,516	1,687,432,939
Beban akrual	2	24,868,122,774	26,096,129,333
Utang pajak	2, 16	16,991,435,203	17,678,905,818
Liabilitas kontrak	2, 17	3,780,016,402	11,408,984,377
Utang jangka panjang			
yang jatuh tempo dalam			
waktu satu tahun			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13	111,003,879,451	119,378,375,343
Utang sewa pembiayaan	2	22,502,952,538	23,415,760,234
Jumlah Liabilitas		1,554,833,151,925	1,826,133,223,912
Jangka Pendek			
LIABILITAS			
JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang, setelah			
dikurangi bagian yang jatuh			
tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13	422,402,911,012	419,583,600,084
Utang sewa pembiayaan	2	20,125,832,170	18,177,703,289
Utang obligasi	2, 18	654,943,249,083	654,464,137,403
Utang sukuk mudharabah	2, 18	206,530,000,000	206,530,000,000
Liabilitas pajak tangguhan	2	39,102,487,603	40,528,333,941
Liabilitas imbalan kerja	2	33,176,812,839	30,144,678,737
Laba yang ditangguhkan atas transaksi			
penjualan dan penyewaan kembali	2	44,047,025	176,188,124
Jumlah Liabilitas Jangka		1,376,325,339,732	1,369,604,641,578
Panjang			
JUMLAH LIABILITAS		2,931,158,491,657	3,195,737,865,490

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal			
Rp 100 per saham pada periode			
31 Maret 2023 dan Tahun 2022	2, 19	643,750,000,000	643,750,000,000
Tambahan modal disetor	2, 19	314,164,475,737	314,164,475,737
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		141,425,224,187	141,425,224,187
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak non-pengendali		6,372,300,984	6,372,300,984
Saham treasuri		(56,908,120,000)	(49,643,362,000)
Penghasilan komprehensif lain		871,889,033,255	871,889,033,255
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya		1,055,563,210,715	1,029,733,872,012
Ditentukan penggunaannya		792,735,214,664	792,735,214,664
Sub-jumlah		3,768,991,339,542	3,750,426,758,839
Kepentingan non-pengendali	2, 20	9,401,248,601	10,180,642,425
JUMLAH EKUITAS		3,778,392,588,143	3,760,607,401,264
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6,709,551,079,800	6,956,345,266,754

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
PENJUALAN BERSIH	2, 21	633,417,242,061	1,975,681,701,627
BEBAN POKOK PENJUALAN	2, 22	435,415,130,007	1,314,966,606,150
LABA BRUTO		198,002,112,054	660,715,095,477
Beban penjualan	2, 23	69,642,663,456	287,864,012,292
Beban umum dan administrasi	2, 23	35,710,407,720	50,808,624,481
Jumlah Beban Operasional		105,353,071,176	338,672,636,773
Pendapatan Operasional		92,649,040,878	322,042,458,704
Pendapatan (Beban) Lain - Lain			
Beban bunga	2	(57,498,338,211)	(54,049,709,478)
Beban administrasi bank	2	(4,623,354,832)	(1,614,111,992)
Penghasilan bunga		1,462,378,972	88,078,863
Penghasilan sewa		156,000,000	6,000,000
Lain - lain bersih	2	6,091,659,211	4,067,488,474
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	2	1,934,094,111	(538,701,372)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2	(6,321,894,448)	(1,676,587,768)
Jumlah pendapatan (beban) Lain - Lain		(58,799,455,197)	(53,717,543,273)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK		33,849,585,681	268,324,915,431
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Kini	2	(10,225,487,140)	(61,547,183,280)
Tangguhan		1,425,846,338	-
Jumlah beban pajak - bersih		(8,799,640,802)	(61,547,183,280)
Laba Sebelum Efek			
Penyesuaian Proforma		25,049,944,879	206,777,732,151
Efek penyesuaian proforma		-	-
Laba Tahun Berjalan		25,049,944,879	206,777,732,151
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		25,829,338,703	206,613,846,918
Kepentingan non-pengendali		(779,393,824)	163,885,233
LABA TAHUN BERJALAN		23,549,944,879	206,777,732,151
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		23,549,944,879	206,777,732,151
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		4.07	32.47

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan					Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Akumulasi atas keuntungan (kerugian) liabilitas imbalan kerja	Surplus revaluasi aset tetap	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya	Total	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
	Modal saham	Saham treasuri	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya									
Saldo Awal - 1 Januari 2023		643,750,000,000	(49,643,362,000)	314,164,475,737	147,797,525,171	6,683,557,766	35,212,945,688	829,992,529,801	1,029,733,872,012	792,735,214,664	3,750,426,758,839	10,180,642,425	3,760,607,401,264
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	25,829,338,703	-	25,829,338,703	(779,393,824)	25,049,944,879
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan modal disetor	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek penyesuaian proforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham treasuri		-	(7,264,758,000)	-	-	-	-	-	-	-	(7,264,758,000)	-	(7,264,758,000)
Surplus revaluasi aset tetap		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2023		643,750,000,000	(56,908,120,000)	314,164,475,737	147,797,525,171	6,683,557,766	35,212,945,688	829,992,529,801	1,055,563,210,715	792,735,214,664	3,768,991,339,542	9,401,248,601	3,778,392,588,143

	Catatan					Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Akumulasi atas keuntungan (kerugian) liabilitas imbalan kerja	Surplus revaluasi aset tetap	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya	Total	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Saham treasuri	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya								
Saldo Awal - 1 Januari 2022		636,250,000,000	-	299,314,475,737	147,797,525,171	2,014,489,779	30,786,631,583	851,790,673,688	1,365,509,997,477	298,467,152,229	3,631,930,945,664	10,606,808,304	3,642,537,753,968
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	206,613,846,918	-	206,613,846,918	163,885,233	206,777,732,151
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan modal disetor	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek penyesuaian proforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham treasuri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus revaluasi aset tetap		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2022		636,250,000,000	-	299,314,475,737	147,797,525,171	2,014,489,779	30,786,631,583	851,790,673,688	1,572,123,844,395	298,467,152,229	3,838,544,792,582	10,770,693,537	3,849,315,486,119

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir
Pada tanggal 31 Maret 2023

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	642,941,039,358	1,849,031,918,440
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(580,921,684,271)	(1,417,739,687,456)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	62,019,355,087	431,292,230,984
Penghasilan keuangan	1,462,378,972	88,078,863
Beban keuangan	(41,236,644,709)	(51,040,993,595)
Pembayaran pajak	(26,086,840,460)	(42,853,667,528)
Penerimaan pajak	-	7,723,167,484
Lain-lain - bersih	6,247,659,211	3,350,751,877
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2,405,908,101	348,559,568,085
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS		
INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(4,173,592,849)	(19,339,679,627)
Perolehan aset hak guna	-	(7,615,000)
Perolehan aset lain-lain	(2,179,957,045)	(1,307,936,000)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(4,056,089,169)	(5,058,518,712)
Hasil penjualan aset tetap	10,129,617,334	4,207,577,379
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(280,021,729)	(21,506,171,960)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENDANAAN		
Penambahan utang bank dan LKBB jangka panjang	50,000,000,000	98,000,000,000
Pembayaran utang bank dan dan LKBB jangka panjang	(55,550,080,818)	(27,493,033,025)
Penambahan utang bank dan LKBB jangka pendek	1,109,091,384,346	897,894,580,331
Pembayaran utang bank dan LKBB jangka pendek	(1,349,029,320,533)	(1,329,394,519,980)
Penambahan obligasi jangka panjang	-	250,000,000,000
Penambahan sukuk mudharabah jangka panjang	-	109,030,000,000
Pembayaran utang sewa	(8,271,690,989)	(32,850,332,141)
Pembayaran beban keuangan (obligasi & sukuk)	(4,694,805,847)	(3,359,623,042)
Penerimaan dari <i>lease-back</i>	9,290,653,370	-
Saham treasuri	(7,264,758,000)	-
Penempatan untuk dana yang dibatasi penggunaannya	40,000,000,000	-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(216,428,618,471)	(38,172,927,857)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir Pada tanggal 31 Maret 2023	
	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
KENAIKAN (PENURUNAN)		
BERSIH KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN	(214,302,732,099)	288,880,468,268
DAMPAK BERSIH		
PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	1,543,701,815	(8,137,798,239)
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL TAHUN	226,407,484,051	90,083,912,069
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR TAHUN	13,648,453,767	370,826,582,098
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:		
Kas dan setara kas	68,253,166,561	377,660,873,098
Cerukan	(54,604,712,794)	(6,834,291,000)
JUMLAH	13,648,453,767	370,826,582,098

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM**a. Pendirian Perusahaan**

PT Integra Indocabinet, Tbk ("Perusahaan" atau "ITG") didirikan berdasarkan akta notaris Soetjipto, S.H., No. 147 tanggal 19 Mei 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-320.HT.01.01.th'90 tanggal 20 Januari 1990.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 20 Juli 2022 menyetujui perubahan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0055698.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industry dan perdagangan besar.

Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

PT Integra Indo Lestari (IIL) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/D.04/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan mencatatkan 1.250.000.000 lembar sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 260 per saham.

c. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-52/D.04/2021, tanggal 8 April 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan total penawaran umum masing-masing sebesar Rp 700.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tahap I masing masing sebesar Rp 450.000.000.000 dan Rp 150.000.000.000 pada tanggal 15 April 2021.

Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tahap II masing masing sebesar Rp 250.000.000.000 dan Rp 109.030.000.000 pada tanggal 28 Maret 2022.

d. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas Bisnis	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)		
				31 Maret 2023			
				31 Mar, 2023	31 Des, 2022	31 Mar, 2023	31 Des, 2022
Entitas Anak Langsung							
PT Narkata Rimba (NKT)	Kalimantan Timur	a	1978	99.00%	99.00%	136,942	137,440
PT Belayan River Timber (BRT)	Kalimantan Timur	a	1972	99.32%	99.32%	338,619	312,740
PT Intertrend Utama (ITR)	Sidoarjo	b	1993	99.79%	99.79%	2,067,484	2,014,717
PT Interkraft (ITK)	Sidoarjo	b	2002	99.53%	99.53%	1,100,440	1,089,642
PT Intera Indonesia (INT)	Sidoarjo	b	2012	99.89%	99.89%	1,069,082	1,024,301
PT Inter Kayu Mandiri (IKM)	Sidoarjo	c	2015	80.00%	80.00%	16,598	16,598
Entitas Anak Tidak Langsung							
<u>Melalui PT Intertrend Utama (ITR)</u>							
PT Superalam Mas (SAM)	Tulungagung	d	2006	100.00%	100.00%	14,645	14,579
<u>Melalui PT Belayan River Timber (BRT)</u>							
PT Kandelila Alam (KAN)	Kalimantan Barat	e	2001	80.00%	80.00%	14,107	11,287
PT Borneo Forestama Lestari (BFL)	Kalimantan Timur	e	2021	100.00%	100.00%	11,412	11,413
PT Borneo Wana Utama (BWU)	Kalimantan Timur	e	2021	100.00%	100.00%	31,625	31,628

Aktivitas Bisnis Entitas Anak / *Subsidiaries's Business Activity*

a. Industri Hak Pengelolaan Hutan/ *Forest Concession Right Industry*

b. Industri Mebel/ *Furniture Industry*

c. Perusahaan Induk/ *Holding Company*

d. Perkebunan/ *Plantation*

e. Belum beroperasi secara komersial/ *Not yet in commercial operation*

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak (Lanjutan)

Perubahan dalam entitas anak selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

PT Kandelina Alam

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KAN menyetujui pengalihan 1.200 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per saham milik Fairuz Mulia dengan harga Rp 4.500.000.000 kepada BRT. Persentase kepemilikan BRT adalah sebesar 30%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KAN menyetujui pengalihan 1.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per saham milik Djaya Iskandar dengan harga Rp 3.750.000.000 kepada BRT. Persentase kepemilikan BRT adalah sebesar 55%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 12 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KAN menyetujui pengalihan 1.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per saham milik Sumitro dengan harga Rp 3.750.000.000 kepada BRT. Persentase kepemilikan BRT adalah sebesar 80%.

PT Borneo Forestama Lestari

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 17 Desember 2021, BRT dan NKT memiliki penyertaan saham masing-masing sebesar 49.500 dan 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham pada BFL. Persentase kepemilikan BRT dan NKT masing-masing sebesar 99% dan 1%.

PT Borneo Wana Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 17 Desember 2021, BRT dan NKT memiliki penyertaan saham masing-masing sebesar 49.500 dan 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham pada BWU. Persentase kepemilikan BRT dan NKT masing-masing sebesar 99% dan 1%.

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal **31 Maret 2023** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	:	Bing Hartono Poernomosidi
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham

Direksi

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Direktur	:	Widjaja Karli
	:	Syany Tjandra
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno

Perusahaan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut "Kelompok Usaha") memiliki 2.245 dan 2.060 orang karyawan tetap masing-masing pada tanggal **31 Maret 2023** (tidak diaudit) dan 31 Desember 2022.

f. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada 27 April 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas mencakup kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijamin setelah dikurangi cerukan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

c. Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK"), untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha telah menerapkan standar yang dipandang relevan dengan pelaporan keuangan.

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara yang lain;
- hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas entitas anak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan entitas anak disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Kelompok Usaha akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

e. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi.

Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Akuntansi Penggabungan Usaha

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis", baik untuk entitas penerima ataupun entitas yang melepas bisnis.

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dalam PSAK No. 38 (2012), pengalihan aset, kewajiban, saham dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak menghasilkan laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang dialihkan harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha jika mereka:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Kelompok Usaha jika:

- (a) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Kelompok Usaha; (ii) memiliki kepentingan dalam Kelompok Usaha yang memberikan pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (b) suatu pihak adalah entitas asosiasi Kelompok Usaha;
- (c) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Kelompok Usaha sebagai *venturer*;
- (d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Kelompok Usaha;
- (e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- (f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- (g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Kelompok Usaha atau entitas yang terkait dengan Kelompok Usaha.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan penyertaan saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Kelompok Usaha dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Kelompok Usaha menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang di mana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Kelompok Usaha menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Kelompok Usaha tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Kelompok Usaha.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Kelompok Usaha tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penilaian model bisnis (Lanjutan)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penghasilan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

KKE dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, KKE disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (KKE seumur hidup).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (Lanjutan)

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan *fee* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mentransfer suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mentransfer liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas di mana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada tingkat hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis;
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Tingkat di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan tingkat hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan yang tidak dijadikan sebagai jaminan dan dibatasi dalam penggunaannya.

Bank yang dijaminan atau dibatasi penggunaannya disajikan sebagai bagian dari "Dana yang dibatasi penggunaannya."

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban produksi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan, jika ada, ditetapkan berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Penyertaan Saham

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam investasi pada entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai terpulihkan atas investasi pada entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Penyertaan Saham (Lanjutan)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Investasi saham pada entitas di mana Kelompok Usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK No. 71.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas, Kelompok Usaha mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

m. Aset Biologis

Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Kelompok Usaha mengukur Hutan Tanaman Industri (HTI) pada nilai perolehan karena manajemen yakin parameter yang digunakan pada pengukuran nilai wajar tidak dapat diandalkan.

Aset biologis merupakan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengembangan HTI dalam daur pertama, kecuali beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, dikapitalisasi dan ditangguhkan pembebanannya sampai saat HTI yang bersangkutan menghasilkan/siap ditebang, serta disajikan pada akun "Aset biologis" di laporan keuangan konsolidasian.

n. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, maka revaluasi secara tahunan perlu dilakukan. Revaluasi secara tahunan tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan, sehingga revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali dianggap cukup.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus/defisit revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus/defisit revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaharuan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**n. Aset Tetap (Lanjutan)**

Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut: (Lanjutan)

	Tahun
Bangunan	10-25
Sarana dan prasarana	10
Instalasi listrik	8-20
Mesin dan peralatan	4-16
Alat-alat berat	8
Kendaraan dan inventaris	4-8

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen, dan jika perlu disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur masa manfaat aset yang diharapkan dan nilai sisa menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan jumlah terdepresiasi yang diperlukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut di atas diakui sebagai aset yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun/periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

o. Properti Investasi

Properti investasi Kelompok Usaha terdiri dari tanah yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi – tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi penurunan nilai, jika ada, dan tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

p. Biaya Ditangguhkan atas Hak Pengusahaan Hutan

Biaya/iuran yang terjadi untuk memperoleh "Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)", seperti biaya Hak Pengusahaan Hutan ("HPH"), analisis mengenai dampak lingkungan, foto udara dan rencana karya pengusahaan hutan, ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat masing-masing IUPHHK tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu IUPHHK.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Beban bunga yang dikapitalisasi dihitung menggunakan biaya pinjaman rata-rata tertimbang Kelompok Usaha setelah penyesuaian pinjaman yang terkait dengan pembangunan spesifik. Ketika pinjaman telah dikaitkan dengan pembangunan spesifik, beban bunga yang dikapitalisasi adalah sebesar beban bunga kotor yang terjadi dikurangi dengan pendapatan atas investasi sementara yang dilakukan. Beban bunga dikapitalisasi dari awal pekerjaan pembangunan sampai dengan tanggal penyelesaian, ketika pekerjaan pembangunan telah selesai secara substansial.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset tersebut dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan sementara jika aktivitas pembangunan terganggu untuk waktu yang berkelanjutan. Beban bunga juga dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan dari properti yang diperoleh secara spesifik untuk pembangunan, tetapi hanya atas aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan properti sedang dalam penyelesaian.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut untuk menentukan kerugian penurunan nilai (jika ada). Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan secara individual, Kelompok Usaha akan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas aset ("UPK").

Estimasi jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai dari aset atau UPK tersebut. Ketika jumlah terpulihkan suatu aset non-keuangan ("UPK") di bawah nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset ("UPK") diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan kerugian penurunan nilai yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

s. Sewa

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Kelompok Usaha menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Kelompok Usaha memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Kelompok Usaha mendesain aset dengan cara menetapkan untuk sebelumnya bagaimana dan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal permulaan atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Sewa (Lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai-rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset pendasar bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik

Jika transaksi jual dan sewa-balik dicatat sebagai penjualan dan sewa pembiayaan, maka penjual-penyewa:

- mencatat sewa-balik dengan cara yang sama seperti mencatat sewa pembiayaan lainnya yang terjadi pada tanggal penerapan awal; dan
- lanjut mengamortisasi setiap keuntungan penjualan selama masa sewa.

t. Perpajakan

Pajak Kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Kelompok Usaha sehubungan dengan situasi di mana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- i) PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii) piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

u. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja".

Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tersebut, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan tersebut terpenuhi.

Beban pensiun Kelompok Usaha ditentukan melalui perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada liabilitas imbalan kerja pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin, dan;
- ii. Beban atau penghasilan bunga neto.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (Lanjutan)

- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Kelompok Usaha mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam beberapa keadaan, Kelompok Usaha mungkin tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Kelompok Usaha memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Dalam keadaan tersebut, Kelompok Usaha mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana Kelompok Usaha dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basic*)

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

w. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode/tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mata uang	31 Maret 2023	31 Desember 2022
US\$ 1	15,062	15,731
EUR 1	16,345	16,713
RMB 1	2,190	2,257

Transaksi dalam mata uang asing lainnya (jika ada) dianggap tidak signifikan.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen dari Kelompok Usaha yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat didistribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

y. Laba per Saham Dasar

Jumlah laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun/periode yang bersangkutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

y. Laba per Saham Dasar (Lanjutan)

Apabila jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

z. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya emisi yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan dikurangkan langsung dari "Tambahan Modal Disetor" yang diperoleh dari penawaran efek tersebut.

aa. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

ab. Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi sangat kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila ada kemungkinan pemasukan manfaat ekonomi.

ac. Saham Treasuri

Saham treasuri diakui dengan menggunakan metode nilai nominal dan dikurangi dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tidak diakui dalam laba rugi. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan dari penjualan saham treasuri di masa yang akan datang, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

ad. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan (*adjusting events*) diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok penjualan serta beban langsung terkait Kelompok Usaha.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Kelompok Usaha menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Kelompok Usaha menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Revaluasi Tanah dan Bangunan

Kelompok Usaha mengukur tanah dan bangunan pada jumlah revaluasian dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain ("OCI"). Kelompok Usaha melibatkan penilai independen dalam menentukan nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2018. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat dibandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

Sewa

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Ketika nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Namun tidak terdapat kepastian bahwa Kelompok Usaha dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut.

Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Taksiran Nilai Realisasi Neto Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas masa depan yang diproyeksikan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
KAS	2,351,671,261	886,999,842
BANK		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1,587,115,101	3,536,684,138
PT Bank Central Asia Tbk	10,693,538,168	1,357,478,738
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,405,045	50,008,980,272
PT Bank ICBC	17,266,270	23,054,230
PT Bank Syariah Indonesia	5,131,261	5,241,261
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	6,503,576	6,591,617
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2,882,126	180,001,819,541
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	19,249,124
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	65,178,206	60,725,634
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	12,742,687,118	14,715,414,820
PT Bank Central Asia Tbk	12,581,054,385	365,563,900
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,341,360	5,977,780
PT Bank ICBC	55,061,400	66,244,657
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	44,732,829
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	2,246,408,284	90,803,895
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	16,014,158,000
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	25,853,923,000	-
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	68,253,166,559	267,209,720,278

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 2% per tahun masing-masing pada tahun 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat rekening yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya pada PT Bank Central Asia Tbk milik Perusahaan sebesar Rp 40.000.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Dana yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integra Indo Lestari	1,309,636	-
PT Integriya Dekorindo	5,721,433,509	7,000,227,215
PT Alam Mentari Sejahtera	192,999,006	401,222,890
Sub Jumlah	5,915,742,151	7,401,450,105

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

5. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

a. Berdasarkan pelanggan (Lanjutan)

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Pihak berelasi - bersih	5,915,742,151	7,401,450,105
Ekspor	308,255,194,637	313,486,390,756
Lokal	26,054,362,468	36,490,223,667
Sub Jumlah	334,309,557,105	349,976,614,423
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,295,332,054)	(5,261,262,179)
Pihak ketiga - bersih	329,014,225,051	344,715,352,244
Jumlah - Bersih	334,929,967,202	352,116,802,349

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Rupiah	28,605,023,327	40,560,662,355
Dollar Amerika Serikat	306,324,943,875	311,556,139,994
Sub Jumlah	334,929,967,202	352,116,802,349

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
1 - 30 hari	257,178,687,634	267,962,272,988
31 - 60 hari	24,078,198,474	14,780,064,727
61 – 90 hari	17,065,312,300	13,436,453,434
> 90 hari	36,607,768,794	55,938,011,200
Sub Jumlah	334,929,967,202	352,116,802,349

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha sebesar Rp 658.063.000.000 dan US\$ 3.125.000 dijadikan jaminan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank dan utang obligasi dan sukuk mudharabah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas nilai piutang tersebut.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Alam Mentari Sejahtera	1,010,000	1,010,000
PT Integriya Dekorindo	158,491,537,335	145,269,602,188
PT Integra Indo Lestari	1,896,435	-
Sub Jumlah	158,494,443,770	145,270,612,188
<u>Pihak ketiga</u>		
Lain-lain	4,820,796,098	8,504,275,347
Sub Jumlah	4,820,796,098	8,504,275,347
Jumlah	163,315,239,868	153,774,887,535

Pada tahun 2018, BRT, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman untuk keperluan operasional kepada PT Tawotu. Piutang tersebut telah dilunasi pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang.

7. PERSEDIAAN – BERSIH

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Manufaktur</u>		
Bahan baku dan pembantu	1,264,832,462,720	1,339,414,591,785
Barang dalam proses	462,155,378,837	453,947,094,750
Barang jadi	638,645,431,182	665,045,715,891
Barang dalam perjalanan	611,343,796	-
<u>Kehutanan</u>		
Bahan baku dan pembantu	67,816,474,766	61,401,043,578
Sparepart	6,148,388,391	4,256,188,709
Sub-Jumlah	2,440,209,479,692	2,524,064,634,713
Cadangan Penurunan Nilai	(8,759,591,539)	(8,759,591,539)
Jumlah	2,431,449,888,153	2,515,305,043,174

Pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.269.043.332.001, di mana menurut pendapat manajemen nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan sebesar Rp 2.087.558.000.000 dan US\$ 1.000.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank dan utang obligasi dan sukuk mudharabah.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas nilai persediaan tersebut.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

8. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Aset tetap	36,243,913,862	34,738,883,363
Persediaan	988,617,859,818	958,329,748,775
Lain-lain	156,606,490,681	113,005,711,192
Jumlah	1,181,468,264,361	1,106,074,343,330

Disajikan dalam laporan

posisi keuangan

konsolidasian sebagai:

Aset lancar	1,145,224,350,499	1,071,335,459,967
Aset tidak lancar	36,017,258,862	34,738,883,363
Jumlah	1,181,241,609,361	1,106,074,343,330

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, Kelompok Usaha memiliki uang muka pembelian aset tetap – tanah yang berlokasi di Lingkar Timur, Sidoarjo seluas ± 3.045 m² dengan nilai sebesar Rp 7.209.051.562.

9. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham terdiri dari:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	44,138,740,252	44,138,740,252
Jumlah	44,138,740,252	44,138,740,252

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

	Persentase kepemilikan	Biaya perolehan	Kenaikan atas perubahan nilai wajar	Nilai wajar
31 Maret 2023 dan 2022				
PT Integriya Dekorindo (ITD)	18,49%	15,990,782,486	(15,990,782,486)	-
Melalui PT Inter Kayu Mandiri				
PT WoodOne Integra Indonesia (WII)	25%	16,560,000,000	22,674,340,252	39,234,340,252
PT Teknologi Optimal Prima (TOP)	8,92%	3,004,400,000	-	3,004,400,000
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	19%	1,900,000,000	-	1,900,000,000
Jumlah/Total		37,455,182,486	6,683,557,766	44,138,740,252

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 18 November 2022, para pemegang saham ITD menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 178.344.235.000 menjadi Rp 208.074.235.000 yang disetor oleh PT Integra Indo Lestari sehingga persentase kepemilikan Perusahaan menjadi 18,49%.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

10. ASET BIOLOGIS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Saldo Awal	14,557,846,542	14,285,061,717
Penambahan	<u>62,769,700</u>	<u>272,784,825</u>
Saldo Akhir	<u>14,620,616,242</u>	<u>14,557,846,542</u>

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset biologis dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset biologis tersebut.

11. ASET TETAP – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

			31 Maret 2023		
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,147,563,793,818	-	-	-	1,147,563,793,818
Bangunan	647,579,887,011	-	-	1,324,999,999	648,904,887,010
Sarana prasarana	124,090,357,523	-	-	-	124,090,357,523
Instalasi listrik	52,715,665,158	-	-	-	52,715,665,158
Mesin dan peralatan	422,255,542,201	3,622,394,064	9,120,464,461	-	416,757,471,804
Alat-alat berat	189,703,260,247	-	-	-	189,703,260,247
Kendaraan	90,926,778,176	80,000,000	465,085,000	-	90,541,693,176
Inventaris	<u>28,953,921,931</u>	<u>467,931,377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29,421,853,308</u>
Sub-jumlah	<u>2,703,789,206,065</u>	<u>4,170,325,441</u>	<u>9,585,549,461</u>	<u>1,324,999,999</u>	<u>2,699,698,982,044</u>
Aset dalam penyelesaian	16,397,695,408	3,258,799,260	-	(1,324,999,999)	18,331,494,669
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	<u>3,203,625,580</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,203,625,580</u>
Jumlah	<u>2,723,390,527,053</u>	<u>7,429,124,701</u>	<u>9,585,549,461</u>	<u>-</u>	<u>2,721,234,102,293</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	177,515,721,453	11,437,896,372	-	-	188,953,617,825
Sarana prasarana	52,589,887,004	2,972,173,207	-	-	55,562,060,211
Instalasi listrik	31,002,782,490	1,009,785,297	-	-	32,012,567,787
Mesin dan peralatan	179,490,437,395	5,698,917,497	1,181,706,933	-	184,007,647,959
Alat-alat berat	186,189,938,400	571,106,062	-	-	186,761,044,462
Kendaraan	69,145,550,058	1,526,169,324	208,319,305	-	70,463,400,077
Inventaris	<u>23,618,065,615</u>	<u>603,887,971</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,221,953,586</u>
Sub-jumlah	<u>719,552,382,415</u>	<u>23,819,935,730</u>	<u>1,390,026,238</u>	<u>-</u>	<u>741,982,291,907</u>
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	<u>956,295,541</u>	<u>43,217,886</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>999,513,427</u>
Jumlah	<u>720,508,677,956</u>	<u>23,863,153,616</u>	<u>1,390,026,238</u>	<u>-</u>	<u>742,981,805,334</u>
Nilai Buku	<u>2,002,881,849,097</u>				<u>1,978,252,296,959</u>

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,122,447,043,813	5,540,000,000	-	19,576,750,005	1,147,563,793,818
Bangunan	613,211,222,086	29,600,000	-	34,339,064,925	647,579,887,011
Sarana Prasarana	89,895,006,796	22,845,015,105	-	11,350,335,622	124,090,357,523
Instalasi Listrik	48,765,697,865	2,339,636,364	-	1,610,330,929	52,715,665,158
Mesin & Peralatan	400,274,118,548	51,373,932,088	38,170,849,055	8,778,340,620	422,255,542,201
Alat-alat Berat	189,703,260,247	-	-	-	189,703,260,247
Kendaraan	93,384,825,045	6,613,214,186	9,071,261,055	-	90,926,778,176
Inventaris	26,288,036,609	2,764,287,658	98,402,336	-	28,953,921,931
Sub-jumlah	2,583,969,211,009	91,505,685,401	47,340,512,446	75,654,822,101	2,703,789,206,065
Aset dalam penyelesaian	301,725,826,743	28,046,630,466	237,719,939,700	(75,654,822,101)	16,397,695,408
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	3,203,625,580	-	-	-	3,203,625,580
Jumlah	2,888,898,663,332	119,552,315,867	285,060,452,146	-	2,723,390,527,053
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	132,408,780,866	45,106,940,587	-	-	177,515,721,453
Sarana Prasarana	42,795,320,542	9,794,566,462	-	-	52,589,887,004
Instalasi Listrik	27,014,269,070	3,988,513,420	-	-	31,002,782,490
Mesin & Peralatan	163,988,570,383	26,683,197,067	11,181,330,055	-	179,490,437,395
Alat-alat Berat	181,454,484,990	4,735,453,410	-	-	186,189,938,400
Kendaraan	67,025,661,525	7,273,786,015	5,153,897,482	-	69,145,550,058
Inventaris	21,443,937,464	2,271,257,487	97,129,336	-	23,618,065,615
Sub-jumlah	636,131,024,840	99,853,714,448	16,432,356,873	-	719,552,382,415
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	783,423,997	172,871,544	-	-	956,295,541
Jumlah	636,914,448,837	100,026,585,992	16,432,356,873	-	720,508,677,956
Nilai Buku	2,251,984,214,495				2,002,881,849,097

Pada periode Maret 2023 dan 2022, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp 1.324.999.999 dan Rp 75.654.822.101.

Pada periode Maret 2023 dan 2022, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset hak-guna dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 477.818.183 dan Rp 22.292.620.744 dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 37.329.540 dan Rp 5.273.088.324.

Pada periode Maret 2023 dan 2022, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari uang muka pembelian masing-masing sebesar Rp 2.777.713.670 dan Rp 22.265.005.418.

Pada tahun 2022, terdapat reklasifikasi aset dalam penyelesaian ke properti investasi sebesar Rp 237.719.939.700.

Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar dan biaya. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah dan bangunan yang dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan KJPP Hari Utomo & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK dalam laporannya masing-masing tanggal 16 November 2018 dan 28 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.265.631.650.564, di mana menurut pendapat manajemen nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap berupa tanah, bangunan dan mesin dan peralatan sebesar Rp 2.222.403.000.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank dan utang obligasi dan sukuk mudharabah.

Kelompok Usaha memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan jangka waktu 20-30 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2023, HGB Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 4-29 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/ diperpanjang saat jatuh tempo.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2023.

Beban penyusutan yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Beban Pokok Penjualan	22,041,039,059	87,542,064,852
Beban Administrasi dan Umum	1,784,785,017	7,211,432,816
Jumlah	23,825,824,076	94,753,497,668

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

	Perkiraan % Penyelesaian	31 Maret 2023 Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan Penyelesaian
Bangunan, Sarana dan Prasarana	90%	11,412,207,820	Mei 2023
Mesin dan Peralatan	86%	6,919,286,849	Juni 2023
Jumlah		18,331,494,669	

	Perkiraan % Penyelesaian	31 Desember 2022 Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan Penyelesaian
Bangunan, Sarana dan Prasarana	82%	7,600,530,294	Juli 2023
Mesin dan Peralatan	75%	8,797,165,114	Agustus 2023
Jumlah		16,397,695,408	

Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah yang belum digunakan oleh Kelompok Usaha yang berlokasi di Wedoroklurak, Sidoarjo.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Maret 2023.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Biaya ditangguhkan atas hak		
pengusahaan hutan, bersih	14,966,862,356	12,921,991,652
Biaya emisi ditangguhkan		
atas utang sukuk	964,081,055	1,114,754,753
Lain-lain	11,503,010,000	11,063,010,000
Jumlah	27,433,953,411	25,099,756,405

Kelompok Usaha memiliki hak pengelolaan hutan (“HPH”) dengan jangka waktu 43-53 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2023, HPH Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 28-31 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HPH tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit modal kerja		
plafon <i>tranche</i> B	349,450,000,000.00	365,000,000,000
RC terbatas <i>tranche</i> B	119,493,287,500.00	200,380,000,000
Kredit modal kerja		
plafon	-	90,000,000,000
RC terbatas	20,000,000.00	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit modal kerja		
<i>revolving</i>	-	50,000,000,000
PT Bank Maspion		
Indonesia Tbk		
<i>Demand loan</i>	25,000,000,000.00	25,000,000,000
Rekening koran	5,011,055,661.00	192,269,030
PT Bank Central Asia Tbk		
<i>Time loan revolving</i>		40,000,000,000
Rekening koran	6,362,810.00	663,735,603
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Rekening koran	-	11,589,116
Sub-jumlah	498,980,705,971	771,247,593,749

Entitas AnakPihak ketiga

PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit modal kerja		
plafon <i>tranche</i> B	170,000,000,000	170,000,000,000
Kredit modal kerja plafon	75,000,000,000	75,000,000,000

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>Letter of credit</i> (US\$ 1.833.044 pada tahun 2022)	-	28,835,613,591
RC terbatas <i>tranche</i> B	27,702,607,651	57,722,616,573
RC terbatas <i>Revolving loan</i>	14,980,591,387	80,670,169
PT Bank Maspion Indonesia Tbk <i>Demand loan</i>	229,873,822,188	150,000,000,000
<i>Fixed loan</i>	85,000,000,000	65,000,000,000
Rekening koran	38,602,728,730	38,957,149,949
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kredit modal kerja <i>revolving</i>	96,200,000,000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus trade finance</i>	-	115,344,260,818
PT Bank Central Asia Tbk Fasilitas kredit ekspor	30,000,000,000	30,000,000,000
Kredit multi	25,000,000,000	25,000,000,000
Rekening koran	10,984,565,593	977,492,529
PT Bank ICBC Indonesia <i>Pre-export financing</i> non-LC (US\$ 427.770 pada tahun 2023 dan US\$ 500.000 pada tahun 2022)	6,443,071,740	7,865,500,000
Sub-jumlah	809,787,387,289	764,783,303,629
Jumlah	1,308,768,093,260	1,536,030,897,378

PerusahaanPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa RC terbatas, kredit modal kerja plafon, RC terbatas *tranche* B, kredit modal kerja plafon *tranche* B, *letter of credit*/SKBDN dan *treasury line* (untuk Perusahaan, ITR, ITK dan INT) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 20 miliar, Rp 90 miliar, Rp 230 miliar, Rp 380 miliar, US\$ 6 juta dan US\$ 2 juta. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8% per tahun pada tahun 2022. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan, ITR dan INT serta piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan dan ITR.

Kelompok Usaha wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 100%.
- Rasio *debt to equity* maksimum 2,5x.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 22 November 2022, Perusahaan dan ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas kredit modal kerja *revolving*, *pre export financing*, *non cash loan* dan *treasury line* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 100 miliar, US\$ 10 juta, US\$ 3 juta dan US\$ 5 juta. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan, piutang dan persediaan milik NKT, BRT, ITK dan INT serta *corporate guarantee* dari NKT, BRT, ITK dan INT. Pada tanggal 31 Desember 2022, fasilitas kredit hanya digunakan oleh Perusahaan saja.

Kelompok Usaha wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1x.
- *Debt/EBITDA* maksimum 4,5x.
- *EBITDA to interest ratio* minimum 1,25x.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 12 Maret 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar dan Rp 25 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2023, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar dan Rp 35 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik INT, ITR dan ITK, aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha serta *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 8 Januari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar. Pada tanggal 27 Desember 2022, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas *time loan revolving* dengan batas maksimum sebesar Rp 40 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 0,6% per tahun untuk fasilitas kredit *time loan revolving* dan 9,25% per tahun untuk fasilitas rekening koran pada tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 April 2023 dan 29 Desember 2023.

Fasilitas ini dijamin dengan rekening giro milik Perusahaan, persediaan dan aset tetap tertentu milik Perusahaan, ITR, INT, IIL dan sebagian direksi Perusahaan.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 1,25x.
- Rasio *debt to equity* maximum 1x.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan dan entitas anaknya, ITR dan ITK, memperoleh fasilitas kredit berupa rekening koran (hanya untuk Perusahaan), *demand loan* dan *omnibus trade finance* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 20 miliar, Rp 70 miliar dan US\$ 7,5 juta (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$). Pada tanggal 28 Desember 2020, terjadi perubahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi Rp 137.750.000.000 (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$). Pada tanggal 29 November 2021, terjadi perubahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi Rp 116.450.000.000 (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$).

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,75%-9,5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 4,25%-5,75% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha. Fasilitas ini telah dilunasi pada 1 Februari 2023.

Kelompok Usaha wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt/EBITDA* maksimum 3,5x.
- *Inventory turnover* maksimum 500 hari.
- *Trade receivables turnover* maksimum 120 hari.
- Rasio *debt service coverage* minimal 1,25x.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa RC terbatas, RC terbatas *tranche* B, kredit modal kerja plafon dan kredit modal kerja plafon *tranche* B dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 85 miliar, Rp 75 miliar dan Rp 170 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8% per tahun pada tahun 2022. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2023.

Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas yang diterima oleh Perusahaan.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 November 2020, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2023, INT memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas *demand loan* dan *fixed loan* dengan batas maksimum masing-masing menjadi sebesar Rp 110 miliar dan Rp 50 miliar.

Pada tanggal 5 November 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tanggal 12 November 2021, ITR merubah batas maksimum fasilitas rekening koran dan *demand loan* masing-masing menjadi sebesar Rp 25 miliar dan Rp 120 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2023, ITR memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas *demand loan* dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 170 miliar.

Pada tanggal 3 Februari 2021, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *fixed loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2023, ITK memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas *demand loan* dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar.

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2023. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik INT, ITR dan ITK, aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha serta *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *time loan revolving* dan kredit ekspor dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 15 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tanggal 8 Januari 2021, INT memperoleh tambahan batas maksimum fasilitas rekening koran menjadi Rp 25 miliar dan fasilitas *time loan revolving* dialihkan menjadi fasilitas kredit multi sebesar Rp 25 miliar.

Pada bulan Agustus 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas *letter of credit usance* dengan batas maksimum sebesar US\$ 1.000.000. Pada tanggal 12 Juli 2021, ITR memperoleh tambahan batas maksimum menjadi US\$ 3.500.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023 dan dibebani bunga sebesar 10,5% per tahun untuk fasilitas rekening koran dan 10,25% per tahun untuk fasilitas lainnya pada tahun 2022.

Fasilitas ini dijamin dengan fasilitas yang diterima oleh Perusahaan.

PT Bank ICBC Indonesia

Pada tahun 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *pre-export financing non-LC* dengan batas maksimum sebesar US\$ 1.500.000. Pada tanggal 24 September 2021, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 1.000.000. Pada tanggal 20 September 2022, ITR memperoleh penurunan batas maksimum menjadi US\$ 500.000. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 6,25% per tahun pada tahun 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim Rusli dan Widjaja Karli. Di samping itu, ITR diwajibkan memelihara rasio *debt to equity* maksimum 3x.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi <i>refinancing</i>	255,937,500,000	265,781,250,000
Skema PEN	63,000,000,000	70,500,000,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Kredit angsuran berjangka	-	4,544,444,444
PT BCA Finance	578,789,093	669,057,292
Sub-jumlah	<u>319,516,289,093</u>	<u>341,494,751,736</u>
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi <i>refinancing</i>	154,360,000,000	160,300,000,000
PT Bank Maspion Indonesia Tbk		
<i>Fixed loan</i> anuitas	49,292,759,326	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Kredit angsuran berjangka	-	24,644,981,833
PT Bank Central Asia Tbk		
Fasilitas kredit investasi	8,708,333,330	10,708,333,330
PT BCA Finance	1,377,335,882	1,617,563,230
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	152,072,832	196,345,298
Sub-jumlah	<u>213,890,501,370</u>	<u>197,467,223,691</u>
Jumlah	<u>533,406,790,463</u>	<u>538,961,975,427</u>
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun	(111,003,879,451)	(119,378,375,343)
Bagian Jangka Panjang	<u>422,402,911,012</u>	<u>419,583,600,084</u>

PerusahaanPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *refinancing* dan kredit skema PEN dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 315 miliar dan Rp 100 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8% per tahun pada tahun 2022. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan masing-masing sampai dengan September 2029 dan November 2024. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp 66.875.000.000.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan, ITK, dan ITR memperoleh fasilitas kredit berupa kredit angsuran berjangka dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 26 Desember 2019, batas maksimum fasilitas diturunkan menjadi sebesar Rp 60 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2025 dengan masa tenggang 6 bulan. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,25%-9,5% per tahun pada tahun 2022. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek. Fasilitas ini telah dilunasi pada 1 Februari 2023.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp 13.333.333.334.

PT BCA Finance

Pada tahun 2018-2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2021-2025. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3,75%-5,99% per tahun pada tahun 2022.

Pembayaran pokok pinjaman pada periode tahun 2022 sebesar Rp 342.636.175.

Entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi *refinancing* dengan batas maksimum sebesar Rp 190 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8% per tahun pada tahun 2022. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan September 2029. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp 23.760.000.000.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 25 Januari 2023, ITR, entitas anak memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas *fixed loan* anuitas dengan batas maksimum sebesar Rp 50 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2023. Fasilitas ini untuk jangka waktu selama 60 bulan. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp 40 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10,25% per tahun pada tahun 2022 dan terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan April 2024. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik INT dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Entitas anak terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt to equity* maksimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 1,25x.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.000.000.000.

PT BCA Finance

Pada tahun 2018-2022, ITR, ITK, BRT dan INT, entitas anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan angsuran bulanan hingga tahun 2025. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3%-7,49% per tahun pada tahun 2022.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp 989.442.022.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Pada tahun 2022, ITR, entitas anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan angsuran bulanan hingga tahun 2024. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 2,68% per tahun pada tahun 2022.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 158.841.968.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan (*waiver*) sebagaimana diperlukan.

14. UTANG USAHA

- a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
Impor	8,652,244,454	7,377,082,705
Lokal	53,369,835,982	79,587,575,324
Jumlah	62,022,080,436	86,964,658,029
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integriya Dekorindo	26,849,348	8,000,000
Jumlah	62,048,929,784	86,972,658,029

- b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Rupiah	53,396,685,330	79,595,575,324
Dollar Amerika Serikat	7,878,199,155	7,180,386,905
Euro	317,154,053	-
RMB	456,891,246	196,695,800
Sub Jumlah	62,048,929,784	86,972,658,029

- c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
1 - 30 hari	55,072,099,952	82,924,183,731
31 - 60 hari	4,852,647,124	2,193,101,492
61 – 90 hari	2,124,182,708	583,878,840
> 90 hari	-	1,271,493,966
Sub Jumlah	62,048,929,784	86,972,658,029

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

15. ASET HAK GUNA – BERSIH

	31 Maret 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	13,090,469,213	-	-	-	13,090,469,213
Alat-alat berat	-	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	91,785,070,850	9,290,653,370	-	(477,818,183)	100,597,906,037
Sewa bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	104,875,540,063	9,290,653,370	-	(477,818,183)	113,688,375,250
Akumulasi Penyusutan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	2,750,991,176	408,348,164	-	-	3,159,339,340
Alat-alat berat	-	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	13,692,648,543	1,480,428,668	-	(37,329,540)	15,135,747,671
Sewa bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	16,443,639,719	1,888,776,832	-	(37,329,540)	18,295,087,011
Nilai Buku	88,431,900,344				95,393,288,239

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	12,570,469,213	3,378,500,000	-	(2,858,500,000)	13,090,469,213
Alat-alat berat	-	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	94,728,818,435	16,490,373,159	-	(19,434,120,744)	91,785,070,850
Sewa bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	107,299,287,648	19,868,873,159	-	(22,292,620,744)	104,875,540,063
Akumulasi Penyusutan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	2,083,018,350	1,877,550,951	-	(1,209,578,125)	2,750,991,176
Alat-alat berat	-	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	11,365,360,392	6,390,798,350	-	(4,063,510,199)	13,692,648,543
Sewa bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	13,448,378,742	8,268,349,301	-	(5,273,088,324)	16,443,639,719
Nilai Buku	93,850,908,906				88,431,900,344

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Maret 2023.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2023
 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Mata Uang Rupiah Indonesia)

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka:

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	12,313,786,286	30,030,410,970
Pasal 23	-	144,617
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	18,453,002,644	4,863,099,459
Jumlah	30,766,788,930	34,893,655,046

b. Utang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Perusahaan		
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	10,000	7,698,192
Pasal 21	220,874,181	293,261,949
Pasal 22	10,391,393	5,406,731
Pasal 23	70,414,768	90,907,684
Pasal 25	1,224,040,705	1,224,040,705
Pasal 26	12,213,544	-
Pasal 29		
Tahun 2023	1,249,802,346	-
Tahun 2022	6,102,494,035	6,102,494,035
Sub-jumlah	8,890,240,972	7,723,809,296

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	50,454,087	1,489,420,271
Surat Ketetapan Pajak		
Kurang Bayar	6,000	456,342,505
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	53,686,630	151,705,302
Pasal 15	7,087,500	9,756,835
Pasal 21	250,798,300	250,149,062
Pasal 22	40,455,762	16,895,839
Pasal 23	268,543,357	150,664,113
Pasal 25	6,552,454,056	6,552,454,056
Pasal 29		
Tahun 2023	-	-
Tahun 2022	877,708,539	877,708,539
Sub-jumlah	8,101,194,231	9,955,096,522
Jumlah	16,991,435,203	17,678,905,818

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2023
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Lain-lain

Pada tahun 2022, Kelompok Usaha memperoleh surat ketetapan pajak sebagai berikut :

2022					
Entitas	Surat Ketetapan Pajak	Jenis Pajak	Periode	Jumlah	Tanggal Surat Ketetapan Pajak
Perusahaan	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Desember 2020	13,431,248,692	April 2022
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	April, Juli-Oktober, Desember 2021	52,323,501,682	Januari-Februari, Juni 2022
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Oktober 2022	55,213,785,205	Maret, Mei-Desember 2022
	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Juni 2021	10,556,000	Juni 2022
	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari, April 2020	10,233,800	Mei 2022
PT Intertrend Utama	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Juni-Oktober, Desember 2021	129,374,481,484	Januari-Februari, Mei, Juli 2022
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Oktober 2022	110,986,242,265	Maret-Desember 2022
PT Interkraft	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	September, Desember 2021	5,247,658,906	Maret, Juni 2022
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Februari-September 2022	20,334,298,301	Januari-Maret 2021
PT Intera Indonesia	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Juli-Agustus, Oktober, Desember 2021	21,745,559,751	April, Juni, Agustus-September, November-Desember 2022
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-September 2022	33,677,919,487	April-Agustus, Oktober-November 2022
PT Narkata Rimba	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2020	2,657,140,200	Maret 2022
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 23	2020	61,947,865	Maret 2022
PT Belayan River Timber	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2021	849,283,407	Mei 2022
	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2020	5,875,805,536	Januari 2022
	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	September, Desember 2020	586,333,618	Januari 2022
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 15	Mei, Desember 2020	7,189,939	Januari 2022
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 22	Februari-April 2020	36,672,281	Januari 2022
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 23	Februari, Desember 2020	156,333,332	Januari 2022
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Desember 2020	2,671,454	Januari 2022

17. LIABILITAS KONTRAK

Akun ini terdiri dari uang muka yang diterima dari pelanggan:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integriya Dekorindo	38,650,146	38,650,146
<u>Pihak ketiga</u>		
Ekspor	3,599,048,907	8,982,959,537
Lokal	142,317,349	2,387,374,694
Jumlah	3,780,016,402	11,408,984,377

18. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

a. Utang obligasi terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Nilai nominal	657,820,000,000	657,820,000,000
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan yang belum diamortisasi	(2,876,750,917)	(3,355,862,597)
Jumlah	654,943,249,083	654,464,137,403
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-
Bagian jangka panjang	654,943,249,083	654,464,137,403

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

18. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH (Lanjutan)

b. Sukuk mudharabah terdiri dari:

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Nilai nominal	206,530,000,000	206,530,000,000
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-
Jumlah	206,530,000,000	206,530,000,000

“Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022” (“Sukuk Mudharabah”)

Pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk “Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022” (“Sukuk Mudharabah”) masing-masing sebesar Rp 250.000.000.000 dan Rp 109.030.000.000.

Obligasi Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Obligasi. Rincian Obligasi yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 197.470.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun; dan
- Seri B sebesar Rp 52.530.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu lima (5) tahun.

Sukuk Mudharabah Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah. Rincian Sukuk Mudharabah yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 83.800.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun; dan
- Seri B sebesar Rp 25.230.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9,75% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu lima (5) tahun.

Berdasarkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), Perusahaan memperoleh peringkat *idA* (*Single A*) untuk Obligasi dan *idA_(sy)* (*Single A Syariah*) untuk Sukuk Mudharabah.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah di atas tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perusahaan menggunakan dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut, setelah dikurangi dengan biaya emisi, sebagai modal kerja Perusahaan dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

“Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021” (“Sukuk Mudharabah”)

Pada tanggal 15 April 2021, Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk “Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021” (“Sukuk Mudharabah”) masing-masing sebesar Rp 450.000.000.000 dan Rp 150.000.000.000.

Obligasi Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Obligasi. Rincian Obligasi yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 42.180.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu 370 hari; dan
- Seri B sebesar Rp 407.820.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun.

Sukuk Mudharabah Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah. Rincian Sukuk Mudharabah yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

18. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH (Lanjutan)

b. Sukuk mudharabah terdiri dari: (Lanjutan)

"Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021" ("Sukuk Mudharabah") (Lanjutan)

Sukuk Mudharabah Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah. Rincian Sukuk Mudharabah yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Seri A sebesar Rp 52.500.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu 370 hari; dan
- Seri B sebesar Rp 97.500.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 10,25% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun.

Berdasarkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Perusahaan memperoleh peringkat *idA-* (*Single A Minus*) untuk Obligasi dan *idA-(sy)* (*Single A Minus Syariah*) untuk Sukuk Mudharabah.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah di atas dijamin dengan Hak Guna Bangunan milik ITK, piutang usaha dan persediaan tertentu milik Perusahaan.

Perusahaan menggunakan dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut, setelah dikurangi dengan biaya emisi, untuk melakukan pelunasan utang entitas anak, ITK dan INT, pada Indonesia Eximbank dan sisanya dipergunakan sebagai modal kerja Perusahaan dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat, antara lain:

- Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perusahaan atau yang akan mempunyai dampak negatif yang material.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan.
- Menjaminkan dan/atau membebankan dengan cara apapun aset Kelompok Usaha.
- Mengalihkan aset tetap yang jumlahnya melebihi 20% dari total aset Perusahaan.
- Mengubah bidang usaha utama.
- Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Mengeluarkan obligasi, sukuk atau efek-efek lainnya melalui Pasar Modal yang dijamin secara khusus.

Di samping itu, Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- EBITDA terhadap jumlah beban bunga minimal 1,25x.
- Rasio *debt to equity* maksimum 3x.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan telah memenuhi seluruhnya persyaratan rasio-rasio keuangan yang ditentukan pada perjanjian penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Saldo beban bunga terutang tahun 2022 sebesar Rp 12.005.833.333 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban akrual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Modal Saham

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan catatan yang dibuat PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

31 Maret 2023 (Tidak Diaudit)

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari Komisaris	4,573,835,000	71.05%	457,383,500,000
Stephanie Kane Ilham	10,000,000	0,15%	1,000,000,000
Direksi			
Halim Rusli	25,000,000	0.39%	2,500,000,000
Widjaja Karli	20,000,000	0.31%	2,000,000,000

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

a. Modal Saham (Lanjutan)

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan catatan yang dibuat PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

31 Maret 2023 (Tidak Diaudit)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Direksi			
Sjany Tjandra	10,000,000	0.15%	1,000,000,000
Wang Sutrisno	10,000,000	0.15%	1,000,000,000
Masyarakat	1,705,301,600	26.51%	170,530,160,000
	6,354,136,600	98,71%	635,413,660,000
Saham treasuri	83,363,400	1,29%	8,336,340,000
Jumlah	6,437,500,000	100%	643,750,000,000

31 Desember 2022 (Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,573,835,000	71.05%	457,383,500,000
Komisaris			
Stephanie Kane Ilham	10,000,000	0,15%	1,000,000,000
Direksi			
Halim Rusli	25,000,000	0.39%	2,500,000,000
Widjaja Karli	20,000,000	0.31%	2,000,000,000
Sjany Tjandra	10,000,000	0.15%	1,000,000,000
Wang Sutrisno	10,000,000	0.15%	1,000,000,000
Masyarakat	1,713,515,800	26.63%	171,351,580,000
	6,362,350,800	98,83%	636,235,080,000
Saham treasuri	75,149,200	1,17%	7,514,920,000
Jumlah	6,437,500,000	100%	643,750,000,000

Perusahaan menerbitkan program MESOP pada tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah 75,000,000 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 298 per saham. Pada tanggal 15 Agustus 2022 jumlah saham tersebut efektif dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. MESOP tersebut menghasilkan tambahan modal disetor di atas nilai nominal sebesar Rp 14.850.000.000.

Perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan program MESOP ini dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0007286 tanggal 16 Januari 2023 sehingga modal saham meningkat dari Rp 636.250.000.000 menjadi Rp 643.750.000.000.

Berdasarkan akta notaris Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") No. 2 tanggal 15 Juli 2022 dari notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui penggunaan alokasi laba bersih tahun 2021 sebagai berikut:

- Membagikan 7,66% dividen tunai sebesar Rp 40.867.780.204 atau Rp 6,5 per saham.
- Sejumlah Rp 494.268.062.435 ditetapkan sebagai dana cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Sisa laba bersih akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perusahaan dan disajikan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**a. Modal Saham (Lanjutan)**

Pada tanggal 25 Maret 2022, Perusahaan melalui surat No. 055/WOOD/03/2022 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan (saham treasury) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, dari tanggal 25 Maret 2022 hingga 24 Juni 2022 dan dilakukan dalam beberapa kali transaksi.

Pada tahun 2022, total saham yang dibeli adalah sebanyak 75.149.200 lembar (nilai nominal Rp 100 per lembar) dengan nilai sebesar Rp 49.643.362.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, total saham treasury 75.149.200 lembar dengan nilai Rp 49.643.362.000.

Pembentukan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan sebagai cadangan dana umum, para pemegang saham menyetujui pencadangan sebagian dari saldo laba Perusahaan sebagai cadangan dana umum sebesar Rp 494.268.062.435 pada tahun 2022 yang diputuskan dalam RUPS pada tanggal 15 Juli 2022.

b. Tambahan modal disetor

Rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Tambahan modal disetor	236,412,562,853	236,412,562,853
di atas nilai nominal		
Biaya emisi saham	(6,142,500,000)	(6,142,500,000)
Selisih transaksi kombinasi		
bisnis antar entitas		
sepengendali	82,846,704,551	82,846,704,551
Pengampunan pajak	1,047,708,333	1,047,708,333
Jumlah	314,164,475,737	314,164,475,737

Saldo tambahan modal disetor di atas nilai nominal berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017 atas 1.250.000.000 lembar saham kepada masyarakat dengan nilai nominalnya dan MESOP.

c. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan transaksi penyertaan saham pada BRT, ITR dan ITK, entitas anak. Pada tahun 2020, ITR, entitas anak, melakukan transaksi penyertaan saham pada SAM. Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan pelepasan penyertaan saham pada ITD

Transaksi tersebut di atas dilakukan antara entitas sepengendali dalam rangka kombinasi bisnis sehingga diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) mengenai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Selisih neto nilai transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali yang dicatat sebagai "Tambahan modal disetor" sehubungan dengan transaksi penyertaan saham di entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun akuisisi	Harga jual	Aset bersih yang diperoleh	Selisih
Entitas anak				
ITD	2021	(123,300,000,000)	(61,702,637,678)	61,597,362,322
SAM	2020	6,750,000,000	3,953,644,773	(2,796,355,227)
BRT	2012	13,125,600,000	27,736,469,667	14,610,869,667
ITR	2012	7,524,000,000	9,096,469,925	1,572,469,925
ITK	2012	4,653,000,000	12,515,357,864	7,862,357,864
Jumlah		(91,247,400,000)	(8,400,695,449)	82,846,704,551

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari hak pemegang saham non-pengendali entitas anak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
PT Inter Kayu Mandiri	3,318,985,380	3,318,985,380
PT Interkraft	2,730,833,525	2,738,280,090
PT Intertrend Utama	2,349,744,361	2,362,365,865
PT Belayan River Timber	(2,644,630,324)	(1,918,980,122)
PT Intera Indonesia	773,421,594	747,435,968
PT Narkata Rimba	1,223,800,428	1,283,461,607
PT Kandelia Alam	1,649,093,637	1,649,093,637
Jumlah	9,401,248,601	10,180,642,425

21. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Ekspor		
Manufaktur		
<i>Building component</i>	220,220,316,943	1,440,322,255,892
<i>Set up</i>	137,580,710,679	247,911,912,036
<i>Knock down</i>	245,219,310,036	211,931,683,647
Lokal		
Manufaktur		
<i>Building component</i>	5,331,855,475	27,939,302,880
<i>Set up</i>	8,455,063,155	7,375,568,800
<i>Knock down</i>	5,973,143,411	5,338,348,062
Kehutanan	10,636,842,362	34,862,630,310
Jumlah	633,417,242,061	1,975,681,701,627

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan bersih konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023		31 Desember 2021	
	(Tidak diaudit)		(Diaudit)	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih
Hampton Lumber Sales	-	-	744,510,222,835	16,45%
Costco Wholesale Corporation	-	-	689,730,482,007	15,24%
Target Store	172,265,622,836	27,2%	-	-

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak Diaudit)
<u>Manufaktur dan Kehutanan</u>		
Pemakaian bahan baku	248,472,096,253	853,749,682,554
Upah buruh langsung	50,598,835,600	115,585,824,091
Beban pabrikasi	92,704,668,770	130,976,126,188
Jumlah beban produksi	391,775,600,623	1,100,311,632,833
Barang dalam proses		
Awal tahun	454,947,094,750	516,015,807,630
Akhir tahun	(462,155,378,837)	(442,662,279,071)
Jumlah beban pokok produksi	384,567,316,537	1,173,665,161,392
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	663,209,812,157	482,765,473,214
Pembelian barang jadi	26,283,432,496	52,553,748,827
Akhir tahun	(638,645,431,182)	(394,017,777,283)
Sub-jumlah	435,415,130,007	1,314,966,606,150
Sub-jumlah	435,415,130,007	1,314,966,606,150
Jumlah beban pokok penjualan	435,415,130,007	1,314,966,606,150

23. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban penjualan</u>		
Kurir dan ekspor	8,487,114,832	234,041,733,918
Gaji dan tunjangan	1,234,793,887	1,078,270,158
Ongkos angkut	1,822,898,604	3,368,882,140
Perjalanan Dinas	255,777,704	397,186,641
Riset dan Pengembangan	875,369,192	1,262,974,841
Promosi	1,000,000,000	2,020,166,000
Komisi	27,876,626,538	19,655,165,340
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	28,090,082,699	26,039,633,254
Jumlah	69,642,663,456	287,864,012,292

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

23. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	11,746,355,913	18,957,360,227
Pajak	327,057,086	634,822,108
Imbalan Kerja	3,032,134,102	2,933,947,567
Penyusutan	1,784,785,017	1,755,482,162
Asuransi	1,504,771,759	1,847,827,879
Jamuan dan sumbangan	6,184,751,766	10,333,060,001
Keperluan kantor	1,368,330,291	3,074,016,987
Sewa	269,360,897	571,593,799
Jasa profesional	7,266,372,836	7,576,810,492
Perbaikan dan pemeliharaan	232,106,742	860,364,637
Perjalanan dinas	246,563,151	248,715,253
Transportasi	475,166,692	689,859,979
Penyisihan penurunan nilai		
piutang usaha	34,000,377	-
luran dan perijinan	18,900,000	41,117,512
Lain-lain (masing-		
masing dibawah Rp 2 miliar)	1,219,751,091	1,283,645,878
Jumlah	35,710,407,720	50,808,624,481

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan non usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

a. Sifat hubungan dan transaksi

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Integra Indo Lestari (IIL)	Induk Perusahaan	Jasa profesional dan beban bunga
PT Alam Mentari Sejahtera (AMS)	Perusahaan Afiliasi	Penjualan
PT Integriya Dekorindo (ITD)	Entitas Asosiasi	Penjualan dan Pembelian

b. Transaksi

Penjualan bersih ke pihak berelasi (sebagai persentase terhadap jumlah penjualan bersih):

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Penjualan Bersih - ITD	1,529,151,902	4,996,136,309
Penjualan Bersih - AMS	572,112,560	837,059,900
Penjualan Bersih - IIL	1,179,852	-
Jumlah	2,102,444,314	5,833,196,209
Persentase terhadap penjualan	0.33%	0.30%

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Transaksi (Lanjutan)

Beban (sebagai persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi):

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
Jasa manajemen IIL	4,796,250,912	4,172,350,266
Persentase terhadap beban umum dan administrasi	13.43%	8.21%

IIL memberikan jasa manajemen di bidang akuntansi, keuangan, pajak, sumber daya manusia dan dukungan jasa teknologi informasi kepada Perusahaan, ITR, ITK, NKT, BRT dan INT.

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
Pendapatan sewa - AMS	3,000,000	-
Jumlah	3,000,000	-
Persentase terhadap pendapatan sewa	2%	0%

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)
Pendapatan bunga - ITD	1,299,188,235	-
Persentase terhadap pendapatan bunga	89%	0%

c. Saldo

Aset (sebagai persentase terhadap jumlah aset):

	31 Maret 2023 (Tidak diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Piutang usaha	5,915,742,151	7,401,450,105
Piutang lain-lain	158,494,443,770	145,270,612,188
Uang muka pembelian	2,140,657,928	2,140,657,928
Jumlah	166,550,843,849	154,812,720,221
Persentase terhadap aset	2.48%	2.23%

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2023

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Saldo (Lanjutan)

Liabilitas (sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas):

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Utang usaha	26,849,348	8,000,000
Utang lain-lain		
Jangka pendek	1,707,911,516	1,687,432,939
Jangka panjang	-	-
Liabilitas kontrak	38,650,146	38,650,146
Jumlah	1,773,411,010	1,734,083,085

Persentase terhadap**liabilitas****0.06%****0.05%****25. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN**

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2023	31 Maret 2022
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk	25,829,338,703	206,613,846,918
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	6,343,256,242	6,362,500,000
Laba per saham dasar dan dilusian	4,07	32,47

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret 2023 (Tidak Diaudit)			31 Desember 2022 (Diaudit)		
	Mata Uang Asing		Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing		Ekuivalen Rupiah
ASET						
Kas dan setara kas	US\$	3,552,880	53,513,475,547	US\$	1,989,886	31,302,895,881
Piutang usaha	US\$	20,337,601	306,324,943,875	US\$	19,805,234	311,556,139,994
Jumlah			359,838,419,422			342,859,035,875
LIABILITAS						
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	US\$	427,770	6,443,071,740	US\$	2,333,044	36,701,113,591
Utang usaha	US\$	523,051	7,878,199,155	US\$	456,448	7,180,386,905
	EUR	19,403	317,154,053	EUR	-	-
	RMB	208,612	456,891,246	RMB	87,145	196,695,800
Jumlah			15,095,316,194			44,078,196,296
Aset - bersih			344,743,103,228			298,780,839,579

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode 31 Maret 2023 dan Tahun 2022.